

Editorial Note

Menggagas Arah Kelembagaan Ideal untuk Indonesia 2045

Pembaca Bappenas Working Papers,

Pada draf Visi Pembangunan Indonesia 2045 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahwa diharapkan akan terwujud di masa tentang Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera. Untuk mencapainya, ada 4 (empat) pilar yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang nasional tersebut yakni: (1) Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK; (2) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (3) Pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pada tataran kelembagaan, Indonesia masih banyak mengalami kendala dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan sebagaimana tercantum pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Berikut ini beberapa isu kelembagaan di berbagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: belum optimalnya hubungan antar lembaga, masih tingginya ego sektoral, dan friksi terkait tugas pokok dan fungsi antar lembaga yang tumpang tindih.

Untuk merespon beberapa isu tersebut Bappenas menyelenggarakan Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan tema 'Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045'. Seminar yang diselenggarakan pada 4 Desember 2018 ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang arah kelembagaan yang ideal untuk menyongsong pembangunan jangka menengah 2025 dan visi Indonesia 2045;
2. Menggali masukan tentang arah kelembagaan melalui pendekatan yang mendalam, layak dan inovatif mendukung berbagai sektor pembangunan;
3. Menjadi masukan bagi *stakeholder* tentang kelembagaan ideal untuk mendukung pencapaian 4 pilar pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang;
4. Mendorong dialog terbuka berdasarkan pendekatan *evidence based policy* terkait permasalahan dan prioritas pembangunan prioritas, serta pilihan kebijakan untuk mengatasinya;
5. Sebagai wadah dialog antara pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi, praktisi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional.

Pada BWP edisi ini, Dewan Editor bekerjasama dengan Staf Ahli Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas dan dibantu para panelis yang terdiri

atas para akademisi menerbitkan 10 artikel terbaik yang diharapkan akan menjadi rujukan para perumus kebijakan dalam bidang kelembagaan.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Delia Widiyanti dan Adelline Syahda dengan judul 'Reformasi Partai Politik Melalui Penyeimbangan Sumber Pendanaan'. Studi ini untuk melihat bagaimana reformasi perlu dilakukan di dalam tubuh partai politik terutama berkaitan dengan pendanaan partai politik. Hal ini akan berimplikasi pada banyak aspek terutama untuk mengembalikan fungsi partai politik sebagai instrumen rekrutmen dan kaderisasi politik. Selain itu agar parpol bukan hanya sekadar menjadi mesin pemilu yang dilakukan secara prosedural tetapi juga dilakukan dalam rangka mendorong demokrasi yang substantif. *Kedua*, artikel berjudul 'Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045' oleh Dody Nur Andriyan yang memberikan gambaran dan pemahaman tentang sistem presidensial multipartai yang ada di Indonesia. Sekaligus beberapa landasan, pemilu serentak yang seharusnya tidak hanya pemilu legislatif dan presiden, tetapi juga kepala daerah. Lebih lanjut artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk sinergi dan harmoni presidensial multipartai dengan pemilu serentak dalam rangka menyongsong Indonesia 2045.

Ketiga, artikel dengan judul 'Anomali *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia' yang ditulis oleh Dwi Rianisa Mausili yang mengamati tentang: (1) relevansi *presidential threshold* di Indonesia; (2) Cara mewujudkan sistem pemerintahan ideal yang lahir dari sistem *presidential threshold* untuk mereduksi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Studi ini diharapkan dapat merekomendasikan kelembagaan yang ideal guna mewujudkan visi Indonesia 2045. *Keempat*, Ahsani Taqvim Aminuddin menulis artikel berjudul 'Narasi Melawan Terorisme dan Kekerasan Berbasis Agama di Pondok Pesantren' yang mencoba mendalami teks narasi yang digunakan Pondok Pesantren dalam upaya melawan narasi terorisme dan kekerasan atas nama agama. Disamping itu studi ini juga ingin mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren dalam mendukung teks narasi tersebut.

Kelima, Sulistyanto Widagdo menulis artikel berjudul 'Pengawasan Usaha Jasa *Video Surveillance* sebagai Kebijakan Keamanan Siber'. Studi ini mencoba untuk meneliti berdasarkan teori-teori hukum maupun teori *surveillance*, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang terkait guna menemukan lembaga pengawasan yang sesuai. Kajian ini juga mendalami pengawasan usaha *video surveillance* di Indonesia, terutama pada kewenangan kementerian atau lembaga di Indonesia. *Keenam*, artikel berjudul 'Model Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Pada Program Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto' yang ditulis oleh Risanda A. Budiantoro, Pradipta P. Larasati, dan Sri Herianingrum. Artikel ini membahas strategi pengembangan pemberdayaan usaha mikro dan

kecil dalam program PUSYAR yang dilaksanakan di Kota Mojokerto. Penelitian secara khusus akan melihat skema, tanggung jawab *stakeholder* yang terlibat dan pengembangan program PUSYAR kedepannya.

Ketujuh, Shilvina Widi Irsanti menulis artikel dengan judul 'Program "HAKI Bahagia" Untuk Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan'. Studi ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan secara rinci tentang konsep, implementasi, analisis ekonomi dan manfaat Arisan HAKI bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam mewujudkan aksesibilitas Hak atas Kekayaan Intelektual. *Kedelapan*, artikel yang ditulis oleh Rodhiah Umaroh dan Rahmi Budhy Fatmasari dengan judul 'Peran Kerangka Kerja Kelembagaan dan Teknologi Terhadap Ketahanan Pangan Jangka Panjang di Indonesia: Pendekatan *Autoregressive Distributed Lag*'. Artikel ini meneliti tentang bagaimana peran penggunaan teknologi pertanian terhadap nilai indeks produksi pangan di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang. Disamping itu studi ini juga mencoba menjawab bagaimana peran kerangka kelembagaan terhadap nilai indeks produksi pangan di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang.

Kesembilan, Putu Samawati menulis artikel berjudul 'Kebijakan Demonopolisasi BUMN sebagai Upaya Penataan Peran dan Kelembagaan Menghadapi Persaingan Global'. Artikel ini mencoba menjawab permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum, yang sifatnya memberikan gambaran tentang rasionalisasi kebijakan demonopolisasi dan fungsi BUMN sebagai *agent of development* dengan mengaitkan kebijakan tersebut dalam hukum yang berlaku kepada tatanan kemasyarakatan. *Kesepuluh*, artikel dengan judul 'Arah Kelembagaan Informasi Geospasial yang Mendukung Pemerataan Pembangunan' yang disusun oleh Suprajaka, Aris Haryanto, Anita Silalahi, Nanda Noor, dan Adi Pradana. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang: (1) Bagaimana kelembagaan simpul jaringan informasi geospasial yang dibutuhkan demi keberhasilan pemerataan pembangunan sesuai Visi Indonesia 2045; dan (2) Bagaimana strategi dan tahapan kelembagaan ini dalam mencapai sasaran pemerataan pembangunan sesuai Visi Indonesia 2045.

Artikel-artikel tersebut tentu semakin memperkaya khasanah kajian kebijakan terutama dalam bidang kelembagaan. Tahun ini merupakan momentum yang cukup tepat, dimana saat ini sedang dilakukan penyusunan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka menetapkan kisi-kisi yang lebih jelas dalam penyusunan Visi Indonesia tahun 2045.

Selamat Membaca.

Muhyiddin
Ketua Dewan Editor